

Jakarta, hariandialog.com - 7-1-19 - Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf syok saat tangannya di borgol ketika dibawa ke Pengadilan oleh petugas. Lantaran dilakukan pemborgolan itu, Irwandi Yusuf curhat ke hakim. Senin (7/1), Irwandi kembali menjalani sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelum dimulai pemeriksaan saksi-saksi, ketua majelis hakim Syaifuddin Zuhri menanyakan kondisi kesehatan para terdakwa.

“Saudara terdakwa sehat?” tanya Zuhri kepada Irwandi. “Terimakasih, saya sehat. Walau secara psikis sedikit syok hari ini, karena baru pertama kali mengalami pemborgolan,” jawab Irwandi.

Menanggapi curhatan Irwandi, Zuhri menjelaskan, pemborgolan merupakan ketentuan baru yang ditetapkan KPK terhadap para tahanan. Setiap tahanan harus diborgol saat di bawa ke luar rutan. Termasuk untuk menghadiri persidangan.

“Mungkin karena ini ketentuan baru ya, jadi Anda sedikit terganggu ya sidang hari ini. Tapi sehat kan ya?” tanya Zuhri lagi. “Sehat,” jawab Irwandi.

Hal senada juga disampaikan terdakwa Hendri Yuzal. Dia juga jadi tahanan KPK karena bersama-sama Irwandi menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi terkait alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

“Sehat Yang Mulia. Sama seperti pak Irwandi agak syok karena baru pertama kali mengalami pemborgolan,” curhat Hendri.

“Kalau saudara?” tanya Zuhri kepada Tengku Saiful Bahri. “Biasa saja,” jawab orang dekat Irwandi itu.

Ketiga terdakwa disidang secara bersama-sama meski berkas perkaranya terpisah. Sebab, jaksa KPK akan menghadirkan saksi-saksi yang ada di berkas perkara ke tiga terdakwa.

Saksi itu Fajri MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh), Musri Idris (mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh), Alhudri (Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh) dan Sayed Fadhil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Fajri menjasi saksi pertama yang diperiksa jaksa KPK mencecar proyek titipan Irwandi . Fajri sempat mengelak. Dia akhirnya tidak berkutik karena jaksa Ali Fikri membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Dalam BAP tersebut , Fajri menjelaskan pernah beberapa kali dihubungi Irwandi Yusuf lewat WhatsApp. Menurutnya, Irwandi menitip sejumlah daftar nama paket proyek tahun anggaran 2018 , nilai proyeknya dan caalon perusahaan rekanan yang akan jadi pemenang terder .”Seingat saya ada dua atau tiga kali beliau kirimkan paket pekerjaan dan nama rekanan,” Fajri akhirnya mengaku.

Bukan hanya Irwandi yang titip proyek ke Fajri , Syaiful Bahri juga pernah. Fajri kenal Syaiful Bahri sejak tahun 2008 karena salah satu rekanan Pemprov Aceh.

“Dalam BAP saudara katakan, saya pernah terima WA dari Syaiful Bahri dan salah satu proyek yang dimenangkan Syaiful ada di Aceh Selatan , nilainya Rp 7,178 miliar. Benar?” tanya Jaksa Fikri.

Kali ini Fajri taak berkelit . Ia menuturkan pesan WA dari Syaiful Bahri diteruskan ke Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Aceh, Nizarli.

Nizarli menyarankan Fajri mengontak langsung ketua kelompok kerja (Pokja) . Ketua Poksa 1 Misdar. Ketua Poksa 2 Usman. Ketua Poksa 3 Ziaudin. “Ada tiga orang , jadi saya me WA ke Pokja . Misal (proyek) di Pokja A ya ke A , kalau (proyek) di B ya ke B ,”ujar Fajri.

Dalam perkara, Irwandi melakukan tiga tindak pidana korupsi. Pertama , menerima suap dari

Suap DOKA dan Gratifikasi Kembali Dibuka Lantaran Tangannya Diborgol Irwandi Yusuf Lapor Ke Hakim

Written by hariandialog.com

Friday, 11 January 2019 09:15 -

Bupati Bener Meriah Ahmadi Rp 1,05 miliar . Rasuah diterima lewat orang kepercayaan , Hendri Yuzal dan Tengku Saiful Bahri .

Ahmadi menyuap Irwandi agar mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Aceh(DOKA) tahun 2018 sebesar Rp 108 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah.

Ia juga ingin proyek pembangunan jalan Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang Rp 41 miliar dan pembangunan jalan Krueng Gekeuh-Bandara Rembele Rp 15 miliar, dikerjakan kontraktor lokal. Hasil nego, Ahmadi bersedia memberikan fee 10 persen dari nilai pagu anggaran kepada Irwandi.

Dakwaan kedua, menerima gratifikasi Rp 8,717 miliar yang diterima Irwandi pada masa jabatan gubernur periode kedua. Dari Mei 2017 hingga Juli 2018.

Dakwaan ketiga, masih soal penerimaan gratifikasi. Jumlahnya Rp 32,45 miliar . Saat Irwandi menjabat gubernur periode pertama 2007- 2012.

Uang itu terkait proyek pembangunan dermaga bongkar muat pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) .Proyek ini dibiayai APBN 2006-2011.

Irwandi menerima setoran “pajak Nanggroe” dari Kepala Nindya Karya Cabang Sumut –Aceh, Heru Sulaksono dan

pemilik PT Tuah Sejati untuk menggarap proyek dermaga Sabang

Pada 2008, Irwandi , yang merangkap Ketua Dewan Kawasan Sabang, menerima setoran Rp 2,9 miliar .Tahun 2010 Rp 9,5 miliar . Terakhir Rp 13,03 miliar pada tahun 2011. **(Sim)**